KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bermasalah, Dana Desa Bakal Dibekukan
Tanggal : Rabu, 20 November 2019
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

Bermasalah, Dana Desa Bakal Dibekukan

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) akan membekukan penyaluran dana desa terhadap desa-desa bermasalah. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto mengatakan, pembekuan ini juga berlaku terhadap desa-desa yang tidak memiliki kelengkapan administrasi atau yang lebih dikenal dengan desa fiktif.

"*Nah*, masalah kerugian negara dan lain-lain, saya rasa itu masih di belakang lagi. Karena sistemnya adalah kalau di dalam satu tahun anggaran misalnya satu kabupaten jatahnya 100, kemudian ada yang tidak disalurkan oleh kabupatennya karena oleh kabupatennya dianggap dia tidak memenuhi syarat administrasi, jadi yang disalurkan cuma 80. Maka, tahun berikutnya kita tidak akan menyalurkan yang 20. Jadi, 20 ini akan kita perhitungkan, kita bekukan. Jadi kalau misalnya harusnya dia dapat 100, maka kita akan hanya bayar 100 dikurangi 80 begitu," ungkap Astera di Jakarta kemarin.

Dia berharap, dengan mekanisme seperti ini, desa yang tidak memiliki kelengkapan administratif akan memperbaiki tata kelolanya. Kasus-kasus yang dari rekening kas negara itu akan masuk ke rekening daerah. Dari daerah tingkat II yang masuk ke rekening desa. "Jadi, biasanya ke rekening daerah, ini yang nanti akan salurkan sejumlah yang direkomendasikan dari Kemendagri," katanya.

Menurut Astera, dana desa ini sangat berdampak pada pembangunan infrastruktur sebab 80% dana desa fokusnya untuk infrastruktur melalui *cash for work* . Sisanya 20% untuk pemberdayaan desa. "Saya menyaksikan sendiri ke beberapa daerah yang namanya pembangunan infrastruktur ini luar biasa dengan menggunakan dana desa," ucapnya.


ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Untuk jumlah desa yang tidak disalurkan dana di tahun berikutnya, Astera mengatakan masih menunggu data Kemendagri. Kemenkeu masih harus menunggu bagaimana kondisi nyata di lapangan. "Ini sebenarnya *kan* domainnya Kemendagri. Jadi kalau saya ditanya berapa jumlah desa atau anggaran yang sudah disalurkan untuk desa yang bermasalah, *nah* ini sekarang kita lagi *nunggu* di Kemendagri yang bermasalah berapa? Nanti dari situ kita bisa *stock packing*," paparnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan, desa fiktif itu tidak ada dan pihaknya satu suara dengan menteri dalam negeri (mendagri) terkait dengan hal ini.

"Terkait desa fiktif, paling awal kami bisa menjawab yang dimaksud desa fiktif adalah desa yang tidak ada penduduknya, namun dana mengucur, tetapi tidak ada pembangunan. Itu tidak ada. Itu kita samakan dulu pemahaman kita," tandas Abdul Halim dalam raker dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Abdul Halim melanjutkan, serapan anggaran memang menjadi tolok ukur pemanfaatan dana desa. Namun, Kemendes juga memiliki tolok ukur lain, yakni rasa sentuhan, di mana ada sentuhan fisik berupa pembangunan dan situasi yang berubah di desa itu. "Ini ada sentuhan di masyarakat ada pembangunan atau situasi berubah," ucapnya.

Selain itu, Kemendes juga berupaya melakukan optimalisasi digitalisasi sehingga Komisi V DPR bisa mengecek desa di masing-masing daerah pemilihan (dapil). Mulai dari sumber daya manusia (SDM) maupun potensi ekonomi. Data potensi desa (potdes) dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjadi bagian dari Indeks Desa Membangun yang digunakan Kemendes. "Kami juga mengusulkan pencairan dana desa ke depan sebanyak tiga kali dengan porsi 20%, 50%, dan 30%. Kami memilih tiga kali supaya lebih mudah diawasi," tandasnya.

kiswondari